

POLA KEGIATAN PERTANIAN, CURAHAN TENAGA KERJA,
DAN PENDAPATAN PETANI PADA WILAYAH SEKITAR PROYEK
PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA TENGAH

Oleh :

Y. Bayu Krisnamurthi *)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Luas kawasan hutan di Jawa merupakan 22,7 % dari seluruh luas daratan. Di Jawa terdapat sekitar 7.523 desa yang wilayahnya berada di sekitar hutan, dengan penduduk sekitar 33,7 juta. Dari jumlah diatas sekitar 14,5 juta penduduknya merupakan petani-petani gurem dengan pemilikan lahan kurang dari 0,1 hektar yang juga berperan sebagai buruh tani.

Masalah kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah sekitar hutan semakin diperberat dengan adanya indikasi telah terjadinya penurunan luas lahan hutan dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Di Jawa Tengah misalnya pada tahun 1984 terdapat 673.600 hektar hutan dengan 605.100 hektar hutan produksi tetap, sedangkan pada tahun 1989 terdapat 647.743 hektar lahan hutan dengan 569.620 hektar hutan produksi (Statistik Kehutanan, 1989). Dengan demikian terdapat penurunan sekitar 35.480 hektar hutan produksi atau sekitar 7.000 hektar per tahun. Pada saat yang sama kepadatan penduduk Jawa Tengah meningkat dari 788 jiwa/km² menjadi 818 jiwa/km² (Statistik Jawa Tengah, 1989), atau sekitar 6 jiwa/km²/tahun.

Proyek Perhutanan Sosial (PS) diharapkan dapat menanggulangi masalah tekanan penduduk terhadap hutan melalui penciptaan kesempatan kerja pada masyarakat dengan turut serta dalam pengelolaan hutan, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kegiatan pertanian di wilayah hutan, introduksi teknologi baru, dan pengembangan kerja sama kelompok. Dengan demikian faktor yang akan dipengaruhi, dan mempengaruhi, kegiatan PS adalah kegiatan pertanian, curahan tenaga kerja dan pendapatan petani di wilayah sekitar proyek tersebut. Untuk itu faktor-faktor tersebut perlu terus ditelaah, baik untuk menilai pelaksanaan PS maupun untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat di sekitar hutan. Penelaahan tidak saja perlu dilakukan terhadap kegiatan petani yang langsung berhubungan dengan PS tetapi juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi keragaan faktor-faktor tersebut.

*) Mahasiswa S2 FPS-IPB di bawah bimbingan Dr.Ir. Bungaran Saragih, Dr.Ir. Mangara Tambunan, Dr.Ir. Bunasor, Dr.Ir. Bonar M. Sinaga.

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran mengenai pola kegiatan pertanian di wilayah sekitar hutan Jawa Tengah, terutama yang berkaitan dengan penguasaan sumberdaya lahan, modal, curahan tenaga kerja, dan pendapatan petani, serta hubungannya dengan proyek PS.
2. Mengadakan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi curahan tenaga kerja dan pendapatan petani di wilayah sekitar hutan untuk kegiatan usahatani dan non-usahatani.
3. Menelaah kemungkinan peningkatan curahan tenaga kerja dan pendapatan keluarga petani di wilayah sekitar hutan.

METODA PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada lima RPH di Jawa Tengah, yaitu RPH Tlogo (KPH Pati), RPH Mliwang (KPH Semarang), RPH Ledok (KPH Telawa), RPH Jambangan (KPH Blora), dan RPH Sapuran (KPH Kedu Selatan). Pengumpulan data dilaksanakan antara September hingga Desember 1990.

Metoda Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda survey untuk mengumpulkan data primer dari petani melalui wawancara dan questioner. Petani contoh untuk petani PS dipilih secara acak sederhana dari daftar KTH, sedangkan petani non-PS dipilih secara acak terkelompok. Data yang dikumpulkan adalah data input-output usahatani, penerimaan dan pengeluaran keluarga petani, serta alokasi waktu anggota keluarga. Jumlah petani contoh adalah 120 petani peserta PS, dan 98 petani non peserta.

Metoda Analisis Data

Metoda analisis yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif kuantitatif, analisis regresi, dan analisis program linier. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan metoda tabulasi untuk memberikan gambaran mengenai kondisi objek penelitian. Analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi curahan tenaga kerja dan pendapatan, baik dengan model persamaan tunggal maupun persamaan simultan. Sedangkan analisis program linier digunakan untuk melihat kemungkinan secara normatif meningkatkan curahan tenaga kerja dan pendapatan. Pengujian hipotesis dilakukan sesuai dengan metoda analisis yang dilakukan.

Pengujian hipotesis analisis deskriptif akan dilakukan dengan uji statistik beda rata-rata (t -test) dan perbedaan nilai

Indeks Gini, pada analisis regresi dilakukan pengujian terhadap parameter dugaannya (t-test, F-test, dan pelanggaran asumsi dasar), dan pada analisis model linier pengujian didasarkan pada hasil solusi optimal.

Dalam analisis deskriptif kuantitatif juga dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan PS dengan metoda skoring.

HASIL PENELITIAN

Rata-rata penguasaan lahan petani sekitar hutan cukup besar, yaitu sekitar 0,610 hektar untuk petani PS dan 0,471 hektar untuk petani non-PS. Kontribusi lahan PS bagi rata-rata penguasaan peserta proyek tersebut adalah 47,3 %. Lahan kering di wilayah sekitar hutan merupakan 65,9 % dari total lahan yang dikuasai.

Luas lahan PS yang efektif dan benar-benar digunakan petani, yaitu sekitar 45,5 %, relatif lebih kecil dibandingkan lahan kering non PS (83,1 %) dan lahan sawah (94,4 %), karena dalam pola tanam yang dilakukan petani hanya dapat mengelola lahan PS di luar lahan yang telah digunakan untuk tanaman pokok dan tanaman keras lainnya. Namun pembagian lahan PS telah memperbaiki distribusi penguasaan lahan petani, ditandai dengan nilai Indeks Gini Ratio sebesar 0,565 sesudah PS dan 0,712 sebelum PS.

Modal yang digunakan petani relatif berfluktuasi. Kegiatan PS menggunakan 26,7 % total modal petani, sedangkan sumbangan bantuan modal dari proyek PS hanya sebesar 3,6 % dari total modal yang diperlukan atau hanya sekitar 13,5 % dari modal yang diperlukan untuk kegiatan PS sendiri.

Kegiatan pertanian di wilayah sekitar hutan masih bersifat sangat tergantung pada lahan (land-base agriculture) dengan kegiatan utama berupa usahatani tanaman pangan lahan kering. Keragaan usahatani non-PS lebih baik dari usahatani PS, terutama karena perbedaan kesuburan lahan. Secara umum pola tanam yang diterapkan telah efisien dalam memanfaatkan lahan, walaupun pemilihan jenis komoditasnya belum menguntungkan. Penggunaan pupuk Urea cenderung berlebih tetapi penggunaan input lain masih kurang. Introduksi teknologi agroforestry dalam PS masih menghadapi beberapa hambatan, terutama sehubungan dengan pemasaran dan pemanfaatan hasil.

Usahatani di wilayah sekitar hutan pada dasarnya telah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, tetapi persentase penggunaan input bukan milik sendiri pada usahatani non-PS lebih besar dari usahatani PS, demikian juga jumlah output yang dijual.

Pelaksanaan kegiatan PS umumnya dapat dinilai baik. Faktor-faktor yang dinilai positif oleh petani peserta dan petugas Perum adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan agroforestry, pengembangan KTH, dan keamanan hutan. Sedangkan faktor-faktor yang dinilai perlu dikembangkan adalah kerja sama dengan instansi lain, seleksi anggota dan manfaat langsung bagi peserta (kesempatan kerja dan pendapatan).

Kegiatan PS diharapkan dapat berpengaruh terhadap penguasaan lahan, curahan tenaga kerja, penguasaan modal, penguasaan teknologi, organisasi petani, dan kerjasama kelembagaan dalam membina petani. Pada kenyataannya kegiatan PS hanya mempengaruhi penguasaan dan distribusi lahan, curahan tenaga kerja, dan terbentuknya KTH. Peningkatan penguasaan lahan memang meningkatkan produksi total tetapi tidak meningkatkan produktivitas karena modal dan teknologi relatif tidak berubah. Demikian pula dengan kegiatan penyuluhan pertanian, ternyata kurang efektif karena kegiatan penyuluhan tersebut (untuk usahatani tanaman pangan dengan pola agroforestry) dilakukan oleh petugas Perum, yang lebih banyak memiliki dasar pengetahuan kehutanan dari pada pertanian. Namun kegiatan pembinaan petani secara umum, yang terdiri dari kegiatan penyuluhan pertanian, penyuluhan kehutanan, pemberian dan penagihan kredit, serta usaha-usaha peningkatan kerja sama petani, telah berhasil meningkatkan keamanan hutan.

Peningkatan produksi dari kegiatan PS memang berpengaruh terhadap pendapatan petani. Pada kenyataannya kegiatan non-pertanian (kegiatan upah) terhadap curahan tenaga kerja dan pendapatan lebih besar dari kegiatan PS.

Petani di wilayah sekitar hutan mencurahkan sekitar 67 % untuk seluruh kegiatan pertanian, dimana kontribusi kegiatan PS mencapai sekitar 18 %. Sedangkan curahan tenaga kerja untuk industri dan jasa mencapai sekitar 17 %, buruh hutan 16 %, dan buruh tani 9 %. Rata-rata pemanfaatan tenaga kerja baru mencapai sekitar 63 % dari seluruh tenaga kerja keluarga potensial. Dalam pelaksanaan kegiatan PS, kontrak penguasaan lahan oleh petani menyebutkan kewajiban petani untuk mengolah lahan andilnya. Hal tersebut mendorong petani untuk menempatkan kegiatan PS sebagai prioritas bagi curahan tenaga kerja keluarganya.

Rata-rata pendapatan keluarga peserta PS mencapai Rp 527.535 per tahun yang secara statistik lebih kecil dari rata-rata pendapatan non-peserta sebesar Rp 594.567 per tahun. Sumbangan kegiatan PS mencapai Rp 69.609 per tahun atau sekitar 12,2 %. Kegiatan pertanian secara keseluruhan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan (sekitar 70 %). Dibandingkan dengan kegiatan pertanian lainnya kegiatan PS merupakan kegiatan dengan produktivitas yang terendah, baik dilihat dari produktivitas tenaga kerja, lahan maupun modal.

Pendapatan dari kegiatan PS ternyata tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan petani. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Gini Ratio tanpa pendapatan dari PS sebesar 0,592, nilai Indeks Gini tanpa pendapatan jasa dan industri sebesar 0,674, dan Indeks Gini pendapatan total mencapai 0,589.

Curahan tenaga kerja dan pendapatan petani di wilayah sekitar hutan masih dapat ditingkatkan hingga 29,7 % dan 72,9 % melalui kebijaksanaan pengembangan terpadu. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan produktivitas lahan PS, lahan kering, dan lahan sawah; peningkatan efektivitas penggunaan lahan PS dan lahan kering; peningkatan modal petani melalui

pemberian kredit, dan peningkatan upah minimum, serta pemberian akses yang lebih besar bagi petani hingga kesempatan kerja untuk kegiatan jasa dan industri dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pola tanam petani sekitar hutan adalah pola tanam tanaman pangan lahan kering, sehingga fluktuasi aktivitas yang dilakukan juga mengikuti pola tanaman tersebut. Kegiatan PS juga memiliki fluktuasi aktivitas dengan pola yang sama. Waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan di usahatani dibatasi oleh iklim, sehingga fluktuasi aktivitas yang sama cenderung menimbulkan konflik penggunaan tenaga kerja keluarga. Kegiatan PS umumnya mendapat prioritas bagi pesertanya karena adanya perjanjian/kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Produktivitas PS yang lebih rendah (baik dilihat dari produktivitas lahan, tenaga kerja, maupun modal) dapat menjadi sumber terjadinya konflik alokasi sumberdaya (tenaga kerja dan modal).

Kegiatan PS telah memperbaiki tingkat penguasaan lahan serta distribusinya, tetapi proporsi bantuan modal yang diberikan relatif masih kecil sedangkan petani memiliki keterbatasan terhadap fasilitas perkreditan.

Produksi pertanian di wilayah sekitar hutan sudah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Masalah yang dihadapi oleh petani adalah pasar hasil produksi yang belum teridentifikasi, jumlah produksi yang masih rendah, dan pengetahuan petani yang terbatas (terutama untuk komoditas buah-buahan atau jenis komoditas baru).

Saran

1. Pembangunan pertanian di wilayah sekitar hutan hendaknya merupakan kegiatan pembangunan yang terpadu. Keterpaduan tersebut menyangkut hal teknis, misalnya kegiatan PS dipadukan dengan kegiatan intensifikasi pertanian; maupun infrastruktur penunjangnya, seperti kegiatan penyuluhan PS dilakukan secara terpadu dengan PPL/BPP, kredit pertanian dan pedesaan (KUT/Kupedes) dapat digunakan untuk kegiatan PS, KUD sebagai penyalur bantuan untuk kegiatan PS, KTH merupakan sarana komunikasi, bukan hanya untuk kegiatan di hutan tetapi juga untuk kegiatan lainnya, dan sebagainya.
2. Petani di wilayah sekitar hutan (KTH) perlu diberikan akses yang lebih banyak terhadap fasilitas-fasilitas dari wilayah lainnya (pemasaran, kredit, informasi kesempatan kerja, dan sebagainya). Perum Perhutani sebagai lembaga dapat berperan lebih besar sebagai "mediator" ini merupakan alternatif sumbangan lain yang dapat diberikan bagi masyarakat sekitar hutan.

3. Kegiatan PS membutuhkan pilihan komoditas non konvensional yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sesuai dengan keadaan tanah hutan, dan dapat menghadapi masalah naungan. Alternatif yang mungkin dikembangkan adalah tanaman kapulaga, jahe, dan tebu. Pemilihan lokasi PS juga perlu dilakukan secara lebih selektif, terutama sehubungan dengan kondisi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnum, H.N. and L. Squire. 1979. An Econometric Application of The Theory of The Farm Household. *Journal of Development Economics*, No. 6. 1979.
- Becker, Gary S. 1976. *The Economic Approach to Human Behaviour*. The University of Chicago Press. Chicago.
- Greenshields, Bruce L. and Margot A. Bellamy (Ed.) 1983. *Rural Development, Growth and Inequity*. Contributed Papers Read at the 18th International Conference of Agricultural Economists. International Association of Agricultural Economists. Gower Publishing Company Limited, Aldershot, England.
- Grounau, Reuben. 1980. *Laeisure, Home Production, and Work*. In Binswanger, Evenson, Florencio, and White. 1980. *Rural Household Studies in Asia*. Singapore Univ. Press.